

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi seperti saat ini, disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance* diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah kebijakan diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Arus reformasi juga berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan yang menjadi peran utama dalam penyelenggaraan reformasi yaitu bidang birokrasi pemerintah yang menuntut bermacam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan di berlakukannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, reformasi keuangan negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak berhenti sampai disitu, seterusnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, dalam modul LAN 2000 bahwa pemerintah akan melakukan berbagai cara perbaikan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan cara penyempurnaan sistem akuntansi serta administrasi negara yang menyeluruh (Lembaga Administrasi Negara 2000).

Salah satu cara yang digunakan pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat atau peraturan perundang tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal tersebut diperkuat dengan dilakukannya reformasi manajemen keuangan negara baik dengan pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa gubernur/ bupati/ walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepada dewan DPR berupa laporan keuangan.

Selain itu hal yang mendasar yang sangat penting dari penerapan akuntansi didalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana pengertian dari standar akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyajikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah terdiri atas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Pada entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami dalam akuntansi pemerintahan, keuangan pemerintahan daerah bahkan organisasional tentang pemerintah (Roviyanti, 2011).

Pada kenyataannya dalam penerapannya di dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi pemerintah. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintahan No.77 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dari upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Untuk laporan keuangan sendiri dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan handal dan dapat dipercaya berkenaan dengan keuangan serta data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama 1 periode pelaporan. Begitu juga dengan laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian dari

auditor. Penilaian tersebut mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang tentu saja berpedoman pada peraturan perundangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Apabila tidak sesuai dari perundang-undangan, maka akan menyebabkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi serta ketidakhematan dan ketidakefektifan. Hal tersebut dapat menjadi kerugian pada periode berikutnya, karena penyusunan keuangan untuk periode berikutnya salah satu yang dijadikan sebagai acuan adalah pelaporan keuangan pada tahun yang sedang berjalan. Dan hal tersebut di beberapa daerah prosentase terjadinya cukup tinggi.

Aspek berikutnya adalah aspek *research gap*, pada penelitian terdahulu bahasan studi tentang penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (penelitian tahun 2014) dengan judul penerapan standar akuntansi pemerintahan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan asset daerah disimpulkan bahwa evaluasi pengakuan pengukuran penyajian, pengungkapan pendapatan belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan penelitian Lilis Setyowati dan WikandIsthika (Penelitian Tahun 2014) dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi, Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada Pemerintahan Kabupaten dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sedangkan Kompetensi sumber daya manusia dan Peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya oleh Arif Ardi Kusumah (penelitian tahun 2012) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan semakin baik karena kualitas laporan keuangan tergantung pada penerapan standar akuntansi pemerintahan itu sendiri.

Berdasar dari fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Berdasarkan beberapa hal yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini berjudul tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi ,Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara)”. Dimana kualitas laporan keuangan dapat dinilai atau disusun berdasar pada sistem akuntansi keuangan yang terdapat pada standar akuntansi pemerintahan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara.
2. Variabel penelitian meliputi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan.
3. Responden penelitian adalah Staff Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara.

1.3. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara?

1.4. Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian hanya membahas mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan serta kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara.
2. Penelitian hanya membahas mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara?

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara akademis dan praktis.

1. Aspek Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan dataoempiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Standara Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan.

2. Aspek Praktis.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan acuan dan dasar pemikiran bagi SKPD Pemerintahan Kabupaten Jepara untuk dijadikan masukan dan pertimbangan, guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi, akan penulis jelaskan secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini memuat tentang teori-teori yang membatasi materi yang relevan dengan topik, yaitu tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini dibahas mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.